

## DUKUNGAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KHUSUSNYA DI SEKOLAH

Oleh: H. Syaiful Sagala \*)

### *Abstract*

Partisipasi dan kepedulian masyarakat terhadap pengendalian mutu pendidikan di sekolah tidak hanya sekedar ditunjukkan oleh kesediaannya membantu dalam bentuk fisik atau bantuan biaya. Akan tetapi partisipasi dan kepedulian tersebut perlu mencakup aspek-aspek mutu layanan belajar. Untuk itu diperlukan partisipasi masyarakat yang dapat mengakomodir kepentingan sekolah dan masyarakat pada tingkat yang lebih luas. Kebijakan yang lebih luas tingkat kabupaten/kota partisipasi masyarakat melalui wadah dewan pendidikan untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan sekolah melalui kebijakan legislatif dan eksekutif. Dukungan masyarakat melalui komite sekolah dan dewan pendidikan merupakan lembaga yang diperlukan pada masa kini untuk mengoreksi dan memberikan masukan ide bagi upaya peningkatan mutu sekolah.

*Kata kunci: partisipasi masyarakat, layanan pendidikan, mutu pendidikan*

### PENDAHULUAN

Orang tua, masyarakat dan dunia usaha yang merasa ikut membiayai pendidikan tidak lagi rela menerima pendidikan yang diurus asal jadi atau tidak bermutu. Sekolah harus diurus atas dasar profesionalisme, bukan asal jadi. Dalam penyelenggaraan pendidikan pemerintah dan yayasan penyelenggara pendidikan tidak bisa lagi hanya didasari asal sekolah itu berjalan apapun keadaannya. Harapan masyarakat tersebut memberikan tantangan baru bagi dunia pendidikan, pendidikan itu harus bermutu dan memiliki akuntabilitas yang tinggi. Sekolah yang menerapkan model manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang tinggi. makin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka makin besar rasa memiliki diikuti makin besar rasa tanggung jawab dan seterusnya makin besar tingkat dedikasi untuk membangun pendidikan. Partisipasi masyarakat memberi arti bahwa pemerintah sebagai pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa

---

\*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

sebagai dukungannya dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan berbasis masyarakat dapat berlangsung efektif apabila diawali dari kebutuhan-kebutuhan akan produk-produk pendidikan tertentu yang memang ada dan dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri.

Partisipasi masyarakat dapat berupa meluangkan waktu memantau kegiatan pendidikan, memberikan uang untuk operasional sekolah, gagasan untuk memecahkan permasalahan pendidikan di sekolah, kepercayaan dan atau kemauan untuk membantu meningkatkan mutu pendidikan yang lebih kompetitif. Hal tersebut sebagai jaminan bagi produk pendidikan yang memberikan manfaat ekonomi lebih besar dari proses pendidikan yang relevan dengan apa yang nyata terjadi di lapangan. Sedangkan produk pendidikan yang tidak dapat diserap oleh masyarakat dikarenakan tidak sesuai dengan kebutuhan, hanya akan menghabiskan dana yang tidak banyak manfaatnya dan rendahnya mutu pembelajaran, keterampilan dan kompetensi yang diperoleh tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkahnya dan menciptakan beban ekonomi bagi masyarakat.

Oleh karena itu, kebutuhan akan produk pendidikan dilihat dari mutu atau kemampuan lulusan yang memiliki kompetensi untuk bersaing sesuai ilmu pengetahuan yang diterimanya di sekolah sudah menjadi kebutuhan masyarakat. Inilah sebabnya para orang tua menginginkan pendidikan yang lengkap untuk anak-anak mereka, untuk pemuda atau generasi mudanya jika ingin bertahan hidup dan berkembang menjadi warga masyarakat yang berbudaya dan berpendidikan memiliki kemampuan penuh. Untuk membahasnya lebih mendalam, maka kajiannya difokuskan pada dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah.

## **PEMBAHASAN**

Pendidikan berbasis masyarakat sesungguhnya adalah konsep pendidikan yang lebih banyak menggunakan masyarakat itu sendiri sebagai wahana pendidikannya. Dengan demikian sekolah bersama masyarakat dapat mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya. Di bawah sistem desentralisasi pemerintahan daerah,

---

50 \*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat, maka manajemen sekolah di arahkan pada pemberdayaan sekolah. Tujuan pokok desentralisasi pendidikan khususnya pada tingkat sekolah adalah mengerahkan dan memberdayakan orang tua untuk bekerja sama lebih baik meningkatkan mutu sekolah. Dengan konsep ini menjadikan orang tua dan masyarakat sekitar sekolah memberi dukungan dan juga ikut bertanggung jawab terhadap sekolah. Berangkat dari pemikiran tersebut, maka fokus pembahasan pada kajian dewan pendidikan dan dewan sekolah, partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, dan partisipasi masyarakat dilihat dari segmen politis.

### **Dewan Pendidikan Dan Dewan Sekolah**

Manajemen sekolah akan efektif jika para pengelola pendidikan mampu melibatkan stakeholders terutama peningkatan peran serta masyarakat menentukan kewenangan, pengadministrasian, dan inovasi kurikulum yang dilakukan oleh masing-masing sekolah. Partisipasi masyarakat setempat dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang dapat memenuhi kebutuhan belajar adalah untuk memenuhi harapan masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu semakin meningkat, sejalan dengan semakin luasnya tingkat persaingan. Salah satu model keikutsertaan atau partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pemberdayaan pendidikan yang telah lama dikembangkan di negara maju adalah pembentukan “Dewan Sekolah” (School Board) sebagai wujud pengembangan dan tanggung jawab masyarakat terhadap pendidikan.

Perlu ada penjelasan yang mendasar bahwa Dewan Sekolah atau komite sekolah bukan pengganti BP3, karena kedua lembaga tersebut mempunyai fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing, tetapi kesemuanya untuk kepentingan sekolah. Kedua lembaga tersebut melaksanakan fungsi tugasnya masing-masing yang lebih dulu dilegalisasi oleh peraturan. Dengan adanya dewan sekolah lokal (*local school board*) menurut Hunt, Herold C (1963) menunjukkan suatu kerjasama yang tinggi untuk meningkatkan kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan yang datangnya dari masyarakat dikombinasikan dari berbagai unsur untuk membuat suatu simbol otonomi lokal. Pengalaman di negara-negara maju

---

\*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

menunjukkan salah satu tugas Dewan Sekolah adalah menjembatani pola hubungan legislatif dan eksekutif memenuhi kebutuhan sekolah berkedudukan pada pemerintahan distrik atau semacam Kabupaten/Kota di Indonesia.

Sedangkan kedudukan BP3 pada sekolah-sekolah di Indonesia sebagai perwakilan orang tua siswa berkedudukan di sekolah. Unsur Dewan Sekolah terdiri atas tokoh masyarakat didukung oleh staf ahli bidang manajemen pendidikan. Ketentuan-ketentuan fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Sekolah diatur dalam aturan tersendiri seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terdaftar di pemerintahan. Bentuk dewan sekolah dikatakan Hunt memiliki minimal 5 kelompok anggota terdiri dari laki-laki dan perempuan, mereka ini dapat terdiri dari kelompok *businessman*, kelompok profesional, kelompok *skilled* dan *unskilled*. *Board school* merupakan persetujuan sebagai pelayanan masyarakat (*public service*) oleh karena itu fungsi tugas anggota *board school* adalah menyervis atau melayani tanpa kompensasi.

Gaji mereka dibayar 15% dari school distrik. Secara umum mereka sebenarnya tidak dibayar oleh sekolah sebagai anggota *board* (Sagala, 2004). Seseorang dapat menjadi anggota *board* adalah atas seleksi masyarakat bagi mereka yang memberikan perhatian terhadap pendidikan dengan membuat suatu program yang menarik dalam pendidikan itu sendiri. Anggota *board* seharusnya perwakilan masyarakat yang memiliki motivasi untuk melayani anak-anak dari seluruh warga. Sebagai perbandingan di Amerika bentuk formal organisasi *board school* dilegalisasi secara hukum yang mencakup bentuk desain programnya, perkantorannya, metode seleksinya, tata cara memilih anggota *board*, dan lainnya. Pada umumnya *board* dipilih dari kalangan mereka sendiri dengan jabatan sebagai presiden, wakil presiden, sekretaris, dan bendahara (*treasurer*). *Board of education* menurut Eastmond biasanya memiliki kewenangan memformulasi peran dan aturan untuk mengontrol dan mengelola sekolah yang berada di bawah hukum mereka seperti hubungan keberadaan aturan daerah yang memiliki kesamaan kekuatan dan pengaruh kekuatan.

Tanggung jawab mereka melaporkan kepada masyarakat kemajuan board school seperti administrasi kantor, orang yang dipekerjakan, kegiatan kelompok dan individu, dan sebagainya atas dasar kebijakan dan keputusan dari masyarakat.

---

52 \*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

Fungsi tugas Board School harus memberikan pengertian dan penekanan pada kekuatan dan kebutuhan dari masyarakat sekolah atau keinginan anggota masyarakat pada umumnya yang memiliki dukungan dan *interest* terhadap peningkatan mutu sekolah. Evaluasi board terhadap pemerintah harus secara berkesinambungan untuk mendukung kegiatan sekolah serta mengatasi permasalahannya yang berdampak kepada kemajuan.

Board mengunjungi sekolah di luar dan di dalam distrik mengamati, mendiskusikan isu, dan menanyakan berbagai pertanyaan mereka sehingga dapat mengembangkan standar sekolah itu yang membuat lebih bagus dan membantu mereka membuat kebijakan lebih lanjut. Dalam konteks Indonesia Dewan Pendidikan dan komite sekolah yang ditawarkan untuk pemberdayaan sekolah adalah menanggapi desentralisasi dimaksudkan untuk menjembatani pemenuhan kebutuhan sekolah melalui kebijakan legislatif dan eksekutif. BP3 tetap berfungsi sebagai mitra sekolah meskipun berubah nama menjadi komite sekolah atau lainnya pada setiap sekolah, sedangkan pada tingkat pemerintah Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan.

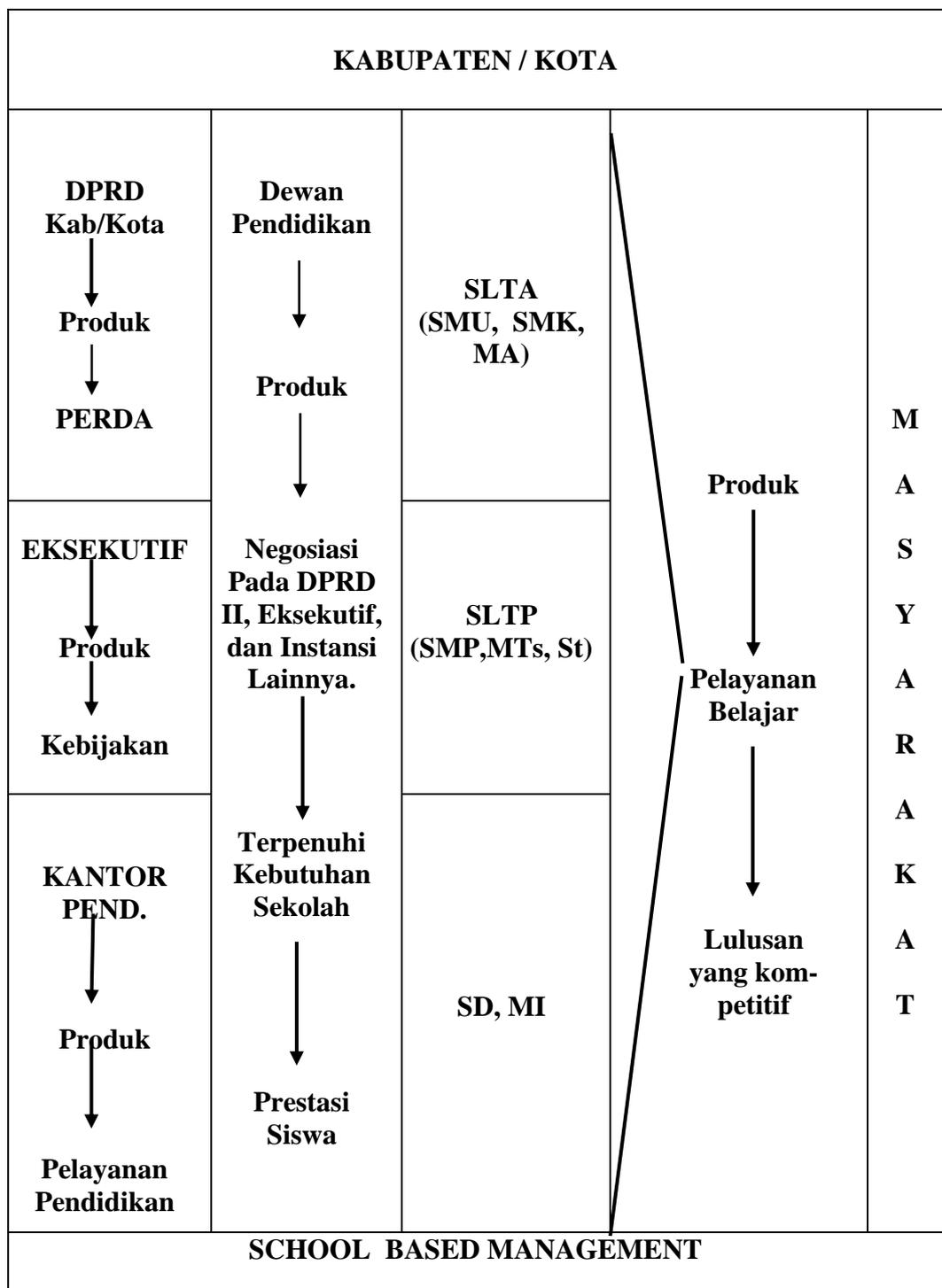
Karena keterbatasan pihak sekolah dari segi waktu dan kemampuan negosiasi untuk mengakses kebutuhan semua jenis dan jenjang sekolah yang berada di daerah Kabupaten/Kota, maka diperlukan wadah Dewan Pendidikan yang efektif dan mampu membuka akses pada pihak legislatif maupun eksekutif. Model dewan pendidikan di Indonesia tidak mesti sama dengan model yang ada di manca negara. Tetapi model-model tersebut dapat dijadikan inspirasi untuk mendesain model yang sesuai dengan iklim di Indonesia. Jika model ini dapat disetujui sebagai model keikutsertaan masyarakat dalam membina membina pendidikan. Maka dapat diatur dan disusun fungsi, tugas, dan kedudukannya yang relevan dengan kultur pendidikan di Indonesia. Aturannya sebagai landasan juridis dapat berupa peraturan pemerintah atau melalui peraturan daerah, sedangkan mekanisme kerjanya diatur dalam suatu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga kedudukan dewan pendidikan maupun program dan seluruh aktifitasnya mempunyai kekuatan hukum (Sagala, 2004). Alur posisi dan interaksi fungsi, tugas, dan tanggung jawab maupun kedudukan Dewan

---

\*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

Pendidikan dan Komite Sekolah tampak pada gambar 1 dalam struktur kantor pendidikan kabupaten/kota.

**Gambar: 1**  
**POLA HUBUNGAN KERJA DEWAN SEKOLAH**



Sumber: Manajemen Berbasis Sekolah dan Masyarakat (Sagala, 2004)

54 \*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

Spesifikasi masing-masing tugas dan tanggung jawab setiap komponen dapat dideskripsikan sebagai berikut: (1) legislatif yang diperankan oleh DPRD mempunyai produk berupa Perda yang mengatur sistem pendidikan; (2) eksekutif yaitu kepala daerah atas nama pemerintah daerah mempunyai produk berupa kebijakan sebagai bagian dari responnya terhadap Perda maupun aturan lainnya yang telah ditetapkan; (3) kantor dinas pendidikan pada pemerintah daerah kabupaten/kota maupun propinsi sebagai aparat pemerintah daerah mempunyai produk memberikan pelayanan kebutuhan satuan pendidikan; (4) sedangkan Dewan Pendidikan mempunyai produk melakukan negosiasi kepada legislatif agar diterbitkan peraturan yang memenuhi aspirasi masyarakat dan melakukan negosiasi kepada pihak eksekutif agar diterbitkan kebijakan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan masyarakat akan mutu pendidikan; (5) satuan pendidikan pada semua jenjang dan jenis sebagai produknya adalah kualitas pelayanan belajar yang berimplikasi pada kualitas lulusan. Ketegasan implementasi kebijakan, kewenangan dan manajemen pendidikan masing-masing level pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat membentuk wadah Dewan Pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah untuk sekolah melalui peraturan pemerintah dan peraturan daerah amat diperlukan.

Dewan pendidikan mengunjungi sekolah di dalam kabupaten/kota tempat mereka berada mengamati, mendiskusikan isu, dan menanyakan berbagai pertanyaan mereka sehingga dapat mengembangkan standar sekolah itu yang membuat lebih bagus dan mereka membantu pemerintah daerah dalam membuat kebijakan lebih lanjut. Karena itu, masyarakat belajar menurut Sergiovanni dan Starrat (1983) harus dilibatkan dalam masyarakat umum yang besar melalui keterlibatan orang tua, dengan menggunakan masyarakat umum sebagai laboratorium belajar, secara aktif mendiskusikan masalah dengan masyarakat umum, dan meningkatkan cita-cita layanan masyarakat yang dapat dipersembahkan oleh sekolah. Sekolah dan masyarakat saling membutuhkan dimana kekuatan dan keterbatasan masing-masing saling melengkapi menjadi satu kekuatan keefektifan manajemen sekolah.

---

\*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

### **Partisipasi Masyarakat Melalui Komite Sekolah**

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 maka Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3) dinyatakan tidak berlaku. Sebagai gantinya pada tingkat satuan pendidikan dapat dibentuk Komite Sekolah atas prakarsa masyarakat. Untuk itu sekolah harus mampu meyakinkan orang tua, pemerintah setempat, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya bahwa sekolah itu dapat dipercaya. Sekolah pada tataran teknis perlu mengembangkan kemampuannya menganalisis biaya sekolah yang berkorelasi signifikan terhadap mutu pendidikan yang akan diperolehnya. Sehingga secara politis pagu anggaran pendidikan yang bersumber dari pemerintah menjadi penting tetap harus diperjuangkan oleh sekolah dan masyarakat.

Model manajemen berbasis sekolah (MBS) mengukuhkan standar pelayanan, sekolah harus mengukur potensi diri dan memperhatikan dimana sekolah itu berada, menyesuaikan diri dengan kultur masyarakat dan pemerintahannya. MBS akan membangun sikap bahwa masyarakat merasa memiliki sekolah, di pihak lain sekolah mengurangi ketergantungannya terhadap birokrasi pemerintah dan birokrasi pemerintah mengurangi tindakan intervensinya terhadap sekolah. Namun di lain pihak dampak dari kebijakan otonomi ini yang harus dihindari adalah munculnya raja-raja kecil di sekolah dan Komite Sekolah. Setiap satuan pendidikan jalur sekolah baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat (swasta) harus menyediakan sumber belajar.

Pengadaan dan pendayagunaan sumberdaya pendidikan dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan atau keluarga peserta didik. Eksistensi pemerintah dan masyarakat sama pentingnya, meskipun pengalaman selama ini masyarakat memang sudah dilibatkan. Tetapi keterlibatan mereka terbatas pada memenuhi iuran BP3, kurang dilibatkan bagaimana pencapaian target kurikulum dan pelayanan belajar yang bermutu. Secara tipikal dukungan orang tua akan tujuan-tujuan pendidikan menurut Sergiovanni (1987) meliputi pengembangan kecintaan untuk belajar, pemikiran kritis dengan kecakapan memecahkan masalah, apresiasi atau penghargaan estetika, kreatifitas, dan kompetensi perseorangan.

---

56 \*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

Model dan format keikutsertaan masyarakat ini diwujudkan dalam bentuk berpartisipasi atas pembuatan keputusan-keputusan di sekolah yang dilaksanakan melalui Komite Sekolah dahulu BP3. Melalui Komite Sekolah ini orang tua dan masyarakat melakukan pengawasan dan memberikan saran, koreksi, dan teguran apabila terjadi penyimpangan. Peran Komite Sekolah bukan hanya terbatas pada mobilisasi sumbangan, tetapi hal yang lebih substansial membantu dan mengawasi pelaksanaan pendidikan. Nama dan ruang lingkup kewenangan wadah ini disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing satuan pendidikan seperti Komite Sekolah, Komite Pendidikan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrasah, Komite TK, atau nama lain yang sesuai dengan kriteria pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan sekolah dengan fokus pemenuhan mutu yang kompetitif.

#### **a. Tugas dan Fungsi Komite Sekolah**

Esensi dari partisipasi Komite Sekolah adalah meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan perencanaan sekolah yang dapat mengubah pola pikir, ketrampilan, dan distribusi kewenangan yang dapat memperluas kapasitas dalam sistem manajemen pemberdayaan sekolah. Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peranserta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan baik pada pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah. Peran aktif Dewan Pendidikan maupun Komite Sekolah diperlukan untuk memberi dukungan (**supporting agency**) dan memenuhi kebutuhan sekolah, pertimbangan pengambilan keputusan, pengawasan manajemen sekolah, mediator antara pemerintah dengan masyarakat dan lainnya secara transparan dan demokratis dengan etika yang kuat.

Badan ini bertujuan untuk meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dengan mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Besarnya peran orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam mengelola sekolah sesuai aturan yang berlaku. Keikutsertaan ini memang di

---

\*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

samping membawa dampak positif dapat juga membawa dampak negatif. Agar tidak tumpang tindih kewenangan dan bentuk partisipasi masing-masing, maka perlu dibuat aturan kapan Komite Sekolah dan masyarakat dapat mengambil sikap untuk melakukan tindakan dan kapan pula harus menjaga jarak. Tugas dan fungsi utama badan ini dapat memberikan masukan, pertimbangan (*advisory agency*), dan rekomendasi pada satuan pendidikan mengenai: (1) kebijakan dan program pendidikan; (2) rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS); (3) kriteria kinerja satuan pendidikan; (4) kriteria tenaga kependidikan; (5) kriteria fasilitas pendidikan; dan (6) hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Konsekuensi dari tindakan *advisory* ini, mendorong badan tersebut secara sungguh-sungguh ikut mencari solusi dan mengatasi berbagai problematika yang dihadapi sekolah untuk memenuhi target kualitas yang ditentukan. Sehingga dapat diperoleh sumber daya manusia berkualitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga pemerintah.

#### **b. Kewenangan Komite Sekolah**

Dewan Pendidikan atau Dewan Sekolah pada tingkat provinsi dan kabupaten/ kota, serta Komite Sekolah atau Dewan Sekolah pada tingkat satuan pendidikan atau sekolah atau apapun namanya. Badan ini bersifat mandiri tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan lembaga pemerintah, tetapi mempunyai hubungan kemitraan dengan pemerintah. Interaksi badan ini dengan pemerintah saling melengkapi, karena mereka saling membutuhkan. Peran badan tersebut akan menciptakan kontrol atas kebijakan pemerintah baik oleh eksekutif maupun legislatif atas dasar kewenangan yang melekat pada wadah tersebut untuk ikut serta berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya, kegiatan sekolah, dan hal lain yang relevan dengan fungsi tugas masing-masing. Badan tersebut mempunyai batas kewenangan yaitu tidak dapat mengintervensi kebijakan pemerintah dan tidak dapat mengkerdilkan arti profesionalisasi pengelolaan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

Eksistensi masing-masing ditegaskan pada kewenangannya mengambil kebijakan sesuai tugas pokoknya. Penegasan kewenangan, tanggung jawab dan mekanisme kerja badan tersebut diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga

---

58 \*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

(AD/ART) masing-masing sesuai kebutuhan dan kekhususan setempat. Dengan demikian pola hubungan kerja Komite Sekolah melakukan negosiasi misalnya penetapan anggaran kebutuhan sekolah kepada eksekutif, menegosiasi eksekutif agar kebijakan diarahkan benar-benar sesuai ketetapan legislatif, dan menampung serta membahas kelayakan semua hal yang diusulkan oleh sekolah yang didukung oleh manajemen sekolah, Komite Sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Dewan Pendidikan untuk tingkat kabupaten/kota dan Komite Sekolah untuk sekolah ditetapkan atas dasar peraturan pemerintah dan peraturan daerah landasan yuridis ini amat diperlukan.

Konsep ini erat sekali kaitannya dengan pengembangan pendidikan dalam rangka otonomi daerah. Pada tahap awal komite sekolah dibentuk di sekolah sesuai jenjang dan jenisnya, ketika pengembangannya semakin membaik, maka ditingkatkan sampai tingkat kecamatan dalam bentuk asosiasi dan selanjutnya tingkat Kabupaten/Kota disebut Dewan Pendidikan (Board of Education) dengan fungsi, tugas, kewenangan, tanggung jawab, dan keanggotaan yang berbeda dengan Komite Sekolah. Jelaslah peran dewan pendidikan dan Komite Sekolah sangat urgen untuk pengembangan sekolah yang memiliki otonomi, dimana seluruh aktivitasnya dapat dikontrol oleh dewan dan komite tersebut. Prinsipnya sekolah harus dikembangkan dengan budaya sekolah, bukan budaya birokratik.

### **Partisipasi Masyarakat Dilihat dari Segmen Politis**

Masyarakat setempat dan orang tua menurut Fiske (1993) adalah wakil yang paling jelas dari masyarakat, meskipun dua kelompok ini tidak identik. Orang tua pelajar adalah pelanggan utama sekolah dan tujuan pokok agar anak-anak mereka memperoleh pendidikan bermutu. Pada dasarnya orang tua tidak berbicara dengan suara kolektif pada tingkat lokal sekalipun. Sedangkan keterlibatan masyarakat memberikan pertimbangan kebijakan pendidikan sebagai kebijakan politik hanya ada pada tingkat nasional melalui wadah Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) yang beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat yang pembentukan dan pengangkatannya dilakukan oleh presiden

---

\*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

bertugas menyampaikan saran, nasihat, dan pemikiran lain sebagai bahan pertimbangan.

Kenyataannya BPPN ini hanya dikenal oleh kalangan tertentu saja, sedangkan masyarakat luas termasuk sebagian besar masyarakat pendidikan di daerah-daerah tidak mengenalnya, baik institusi maupun kinerja serta kontribusinya terhadap mutu pendidikan. Karena peran BPPN tersebut tidak kelihatan, maka untuk memenuhi tuntutan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan khususnya pada tingkat lokal, telah diterbitkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang mengatur keikutsertaan masyarakat dalam hal ini orang tua sebagai masyarakat pada tingkat sekolah. Meskipun sesungguhnya peran serta masyarakat dapat berupa perorangan, kelompok, ataupun lembaga seperti industri. Peran serta kelompok akan lebih efektif karena dapat dihimpun suatu potensi yang lebih besar mendukung penyelenggaraan pendidikan. Kondisi obyektif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga menyadari bahwa model keterlibatan masyarakat yang selama ini belum memberi arti yang memadai terhadap peningkatan mutu pendidikan. Karena itu pemerintah dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah menerbitkan keputusan sebagai *direction* keikutsertaan masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan.

Bertolak dari sudut pandang partisipasi masyarakat dilihat dari segmen politik, institusi sekolah bersama masyarakat perlu menyusun suatu model kebijakan yang menggambarkan format ideal partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan. Format tersebut menggambarkan sampai batas mana masyarakat dapat berpartisipasi dalam manajemen pendidikan dan sampai dimana mereka memasuki kawasan intervensi. Kemudian bagaimana masyarakat itu dapat berpartisipasi memenuhi kebutuhan sekolah. Salah satu solusinya aspirasi dan keikutsertaan masyarakat disalurkan melalui suatu forum yang secara faktual di lapangan telah ada yaitu Bantuan Penyelenggaraan Pengelola Pendidikan (BP3) yang telah diubah menjadi “*Komite Sekolah*” sebagai pengembangan dari BP3. Komite sekolah merupakan bagian dari kebijakan politik, komite sekolah dirancang akan membantu menyelesaikan masalah-

---

60 \*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

masalah sekolah, termasuk dukungan pembiayaan dan lainnya. Se jauh ini peran serta masyarakat untuk memberi pertimbangan dan pengawasan program pendidikan pada tingkat propinsi dan kabupaten/kota telah menjadi keputusan politik yang diatur dalam UUSPN dalam bentuk Dewan Pendidikan.

Partisipasi masyarakat dilihat dari segmen politis menggambarkan organisasi dan kelompok-kelompok yang berkepentingan bersaing seperti organisasi kemasyarakatan, legislatif dan eksekutif untuk memperoleh perhatian dan sumber daya yang mengarahkan interaksi tersebut. Hit, Ireland, dan Hoskisson (1996:48) mengatakan segmen politis mencerminkan bagaimana masyarakat dan organisasi kemasyarakatan mencoba mempengaruhi pemerintah dan bagaimana badan-badan pemerintah mempengaruhi mereka. Dewan Pendidikan di daerah yang mewakili aspirasi masyarakat pendidikan harus menganalisis segmen politis dengan cermat, filosofi dan kebijakan yang berhubungan dengan pendidikan. Organisasi menurut Scott (1992:348) tidak kebal terhadap proses politik, oleh karena itu ditekankan kepada Dewan Pendidikan maupun pemerintah daerah kabupaten/kota agar konsisten kepada visi dan misinya sendiri.

Dewan Pendidikan penting menyatakan secara jelas (*clear*) apa kriteria yang akan dituju dan selalu dalam konsep yang normatif melayani keinginan lebih dari yang lain. Tingkat komitmennya merupakan bidang dimana kebijakan administrasi mempengaruhi operasi dan keunggulan organisasi. Arah dan stabilitas faktor-faktor politik merupakan pertimbangan penting bagi pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan strategi program pendidikan. Karena faktor politik dapat menentukan parameter legal dan regulasi yang membatasi operasi penyelenggaraan pendidikan khususnya di sekolah.

Kendala politik atas penyelenggaraan pendidikan dapat diatasi melalui aturan tentang pemerataan pendidikan, anggaran pendidikan, wajib belajar, ketentuan kesejahteraan guru, batasan administrasi, dan sejumlah aturan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Eksekutif di pemerintah daerah bersama legislatif dibantu Dewan Pendidikan harus mencermati bahwa Undang-undang dan peraturan mengenai pendidikan yang ada harus betul-betul mendukung dan

---

\*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

memperlancar penyelenggaraan pendidikan. Karena undang-undang dan berbagai peraturan cenderung bersifat membatasi, akibatnya pihak-pihak yang bertanggung jawab cenderung mengurangi potensi kreatifitas dan inovasinya, hal ini jika dibiarkan akan memperlemah pemberdayaan satuan pendidikan. Para ahli pendidikan bersama pemerintah daerah, legislatif dan Dewan Pendidikan di daerah harus mencari bentuk kebijakan, peraturan, dan hukum yang menjamin kualitas pendidikan yang dapat mencapai tingkat keunggulan.

Pilihan strategis untuk merespon pengaruh politik antara lain adalah peran antara legislatif dan eksekutif melakukan koordinasi melaksanakan hak dan tanggung jawabnya merespon aspirasi masyarakat dan Dewan Pendidikan memberikan informasi serta melakukan negosiasi kepada legislatif dan eksekutif memperoleh fasilitas dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan. Legislatif mestinya secara proaktif menggunakan hak inisiatif dan penyelidikan memfasilitasi dan merespon kebutuhan pendidikan di masyarakat serta mengoptimalkan fungsi dan deteksi keamanan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan program pendidikan nasional di daerah.

## **PENUTUP**

Desain organisasi pendidikan yang sentralistik telah mengabaikan tanggung jawab (akuntabilitas) masyarakat, dan jauh dari upaya pemberdayaan masyarakat. Pendidikan yang terasing dari rakyat dapat dikatakan merupakan perkosaan terhadap rakyat, karena itu diperlukan format yang menempatkan tanggung jawab pendidikan kepada rakyat sehingga proses pembangunan demokrasi yang sangat mendasar dalam pembangunan pendidikan dapat direalisasikan. Oleh karena itu tuntutan desentralisasi adalah bagian dari akuntabilitas pemerintah terhadap masyarakat sebagai pemiliknya. Akuntabilitas ini dirancang yang dapat mengembangkan persatuan Indonesia serta menjawab kebutuhan akan pendidikan bagi masyarakat. Pengembangan akuntabilitas terhadap masyarakat akan menumbuhkan kreatifitas, inovasi, produktivitas dan otonomi yang menjadikan pendidikan berbasis pada masyarakat (community based education). Bertitik tolak dari kondisi tersebut dipandang perlu membangun sistem persekolahan yang mampu memberikan kemampuan dasar (basic skill)

---

62 \*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009

bagi siswa dan kemampuan meningkatkan kualitas secara terus-menerus bagi guru dan tenaga kependidikan. Agar penyelenggaraan pendidikan lebih aspiratif dan efektif, maka format ideal perlu mengikutsertakan masyarakat dalam pembangunan pendidikan di sekolah, dan masyarakat menjadi stakeholders yang utama dari proses dan manajemen pendidikan khususnya di sekolah. Komite Sekolah di sekolah tetap eksis sebagaimana biasa, dan fungsi, tugas, maupun tanggung jawabnya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

## DAFTAR BACAAN

Depdiknas (2002). *Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.014/U/2002 tanggal 2 April 2002*. Jakarta: Depdiknas, tidak diterbitkan.

Fiske, E. B (1996). *Decentralization of Education: Politics and Consensus*. Washington DC: The World Bank.

Hitt, at al (1997). *Manajemen Strategis Menyongsong Era Persaingan dan Globalisasi*. Alih bahasa oleh Armand Hedyanto. Jakarta: Erlangga.

Hunt, H. C. (1963). *Educational Administration and Finance dalam Becoming an Educator*. Boston: Houghton Mifflin Company.

Sagala, S. (2004). *Manajemen berbasis sekolah dan masyarakat: Strategi memenangkan persaingan mutu*. Jakarta: Nimas Multima.

Sergiovanni, T. J dan Starratt, R. J. (1983). *Supervision Human Perspectives*. New York: McGraw Hill Book Company.

Sergiovanni, T. J. (1987). *The Principalship: A Reflective Practice Perspective*. Boston: Allyn and Bacon Inc.

---

\*) H. Syaiful Sagala, adalah dosen pada (1) jurusan Pendidikan Ekonomi FE Unimed; (2) program studi Administrasi Pendidikan Program Pascasarjana Universitas Negeri Medan; dan (3) program studi Manajemen Kelembagaan Islam Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara. Pengalaman organisasi sebagai Ketua Umum Ikatan Sarjana Manajemen Pendidikan Indonesia (ISMaPI) daerah Sumatera Utara periode 2005-2009